



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

UNIT KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASYKUR
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 210917

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.095.051.600

1. Tanah Seluas 831 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 3.696.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 371 m²/90 m² di KAB / KOTA
KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 880 m²/400 m² di KAB / KOTA
KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 59 m²/59 m² di KAB / KOTA
KEPULAUAN ANAMBAS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 117.495.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m²/306 m² di KAB / KOTA
KEPULAUAN ANAMBAS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 368.642.000
6. Tanah Seluas 19.747 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 33.569.900
7. Tanah Seluas 16.830 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 28.611.000
8. Tanah Seluas 19.125 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 32.512.500
9. Tanah Seluas 17.956 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 30.525.200
10. Tanah Seluas 19.006 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
11. Tanah Seluas 10.000 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,



- HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
12. Tanah Seluas 1.881 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
13. Tanah Seluas 421 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
14. Tanah Seluas 359 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
15. Tanah Seluas 9.102 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
16. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m²/120 m² di KAB / KOTA
KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
17. Tanah dan Bangunan Seluas 4.723 m²/332 m² di KAB / KOTA
KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
18. Tanah Seluas 14.085 m² di KAB / KOTA NATUNA, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
19. Tanah Seluas 1.753 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
20. Tanah Seluas 685 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
21. Tanah Seluas 10.000 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
22. Tanah Seluas 9.945 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
23. Tanah Seluas 10.000 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
24. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m²/150 m² di KAB / KOTA
KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
25. Tanah Seluas 4.718 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 23.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
 2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
 3. MOTOR, KAISAR/TRISEDYA SEPEDA MOTOR RODA 3 Tahun
2017, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	750.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.890.964
F. HARTA LAINNYA	Rp.	3.000.000
Sub Total	Rp.	3.888.942.564
III. HUTANG	Rp.	2.021.864.683
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.867.077.881

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.